

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta sudah ada sejak dahulu dengan istilah berbeda-beda. KPP Pratama Surakarta statusnya sebelum menginjak tahun 1966 adalah Kantor Dinas Luar Tingkat 1 (KDL Tk.1) Surakarta ini berada dibawah naungan Kantor Inspeksi Keuangan wilayah kerja D.I.Y (Yogyakarta). Karena di tahun 1966 jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak semakin banyak, sehingga KDL Tk. 1 Surakarta lebih meningkat statusnya berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (KIK) Surakarta dengan KDL Tk.1 Klaten yang dibawahinya. Diakhir tahun 1966 berbagai sebutan lain dari Kantor Inspeksi Pajak Surakarta berubah menjadi KPP Surakarta dengan tipe A berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.94/KMK.01/1994 pada tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi Tata cara kerja DJP, dengan wilayah kerja mencakup Kotamadya, Boyolali, Sragen, serta Kantor Penyuluhan Pajak Sragen yang berada di kota Sragen.

2. Berhubung adanya oraganisasi kembali atau reorganisasi pada lingkungan DJP, diubah sebagai KPP Pratama Surakarta. Kantor ini berlokasi di Jl. K.H Agus Salim No. 1 dan sudah terbentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak (Kep-141/PJ/2007) tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi. Tata kerja sekarang beroperasi awalnya Kantor

Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II

dan

3. Kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jateng I, Kantor Wilayah DJP II, Kanwil DJP D.I.Y. KPP Pratama Surakarta awal mula dioperasikan tanggal 30 Oktober 2007 sampai sekarang. Wilayah kerja KPP Pratama Surakarta telah mencakup 5 kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari.
4. Terbentuknya KPP Pratama Surakarta termasuk dalam bagian program perpajakan reformasi birokrasi bersifat komprehensif, mulai beroperasi tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya Kanwil dan Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar. Terbentuknya Kantor Pelayanan Pratama lanjutan berlandaskan terbitnya SE-19/PJ/2007 tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan yang modern di Kanwil DJP.
5. Seluruh Indonesia pada tahun 2007-2008 semua KPP Pratama terbentuk. Perubahan ini mencakup struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Struktur DJP mengalami perbaikan yang terefleksi pada karakter kantor modern antara lain adanya *Account Representative* untuk memberikan pelayanan pada Wajib Pajak, dan sistem penggajian yang lebih baik yang diawasi oleh Komite Kode Etik Pegawai

**A. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta Tahun 2015**

Data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Surakarta untuk mengetahui rencana dan realisasi penerimaan PPN adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Target dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015

Tahun	Target	Penerimaan
2015	447.636.595.119	321.777.272.496

Sumber : Seksi PDI

Untuk menghitung rencana dan realisasi di KPP Pratama Surakarta maka perlu menggunakan rumus rasio:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Rencana Pajak}} \times 100\% \\ & = \frac{321.777.272.496}{447.636.595.109} \times 100\% \\ & = 71.88 \end{aligned}$$

Tabel 4.2

Rencana dan realisasi PPN terhadap penerimaan KPP Tahun 2015

Tahun	Rencana	Realisasi	Prosentase
2015	447.636.595.119	321.777.272.496	71,88%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang sudah diolah tersebut terlihat bahwa rencana penerimaan PPN terhadap KPP Pratama Surakarta Tahun 2015 sebesar Rp 321.777.272.496 sudah terealisasi dengan baik, namun pencapaiannya hanya mencapai sebesar 71,88% dari target yang sudah direncanakan sebesar Rp 447.636.595.119 dan belum mencapai 100%.

#### **B. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Surakarta Tahun 2016**

Data yang diperoleh peneliti dari KPP Pratama Surakarta untuk mengetahui rencana dan realisasi penerimaan PPN adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Target dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2016

(dalam rupiah)

Tahun	Target	Penerimaan
2016	495.739.467.309	369.215.991.161

Sumber: Seksi PDI

Perhitungan dengan menggunakan rasio, berikut dibawah ini :

$$\frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Rencana Pajak}} \times 100\%$$

$$= \frac{369.215.991.161}{495.739.467.309} \times 100\%$$

$$= 74,47\%$$

Tabel 4.4

Rencana dan realisasi PPN terhadap penerimaan KPP Tahun 2016

Tahun	Rencana	Realisasi	Prosentase
2016	495.739.467.309	369.215.991.161	74,47%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data yang sudah diolah diatas terlihat bahwa rencana penerimaan PPN terhadap KPP Pratama Surakarta Tahun 2016 sebesar Rp 369.215.991.161 sudah terealisasi dengan baik, namun pencapaiannya hanya sebesar 74,47% dari target yang sudah direncanakan sebesar Rp 495.739.467.309 dan belum mencapai target 100%.

Untuk itu diharapkan pada tahun 2017 rencana dan realisasi PPN bisa mencapai target 100% seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat Surakarta yang semakin meningkat.

**C. Kontribusi pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Surakarta tahun 2015-2016**

Tabel 4.5

Kontribusi PPN terhadap Penerimaan KPP

(dalam prosentase)

Jenis pajak	Tahun		Kenaikan/Penurunan
	2015	2016	
PPN	71,88 %	74,47 %	+ 2,59 %

Sumber : Data diolah

Dilihat dari tabel diatas dalam waktu 2 tahun menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 Kontribusi Penerimaan PPN di KPP Pratama Surakarta naik sebesar 2,59 %. Kontribusi Penerimaan PPN di KPP Surakarta sudah baik karena mengalami kenaikan, walaupun secara keseluruhan belum mencapai target 100%. Hal ini terlihat bahwa masyarakat Surakarta sudah mulai mengembangkan kegiatan perekonomiannya yang semakin pesat sekarang ini.

Pendapatan Kontribusi sektor usaha perekonomian di Surakarta yang berdasarkan data yang didapatkan langsung dari KPP Surakarta :

1. Sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi sekitar 27% terhadap penerimaan regional.
2. Sektor industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 11%
3. Sektor kontruksi sebesar 12%
4. Sektor jasa sebesar 14%

5. Setor pengangkutan dan komunikasi sebesar 14%
6. Sektor keuangan sebesar 19%
7. Dan yang terakhir adalah sektor Pertanian, Penggalian, Listrik Gas dan Air Bersih 3%.

Dari data diatas dapat dilihat dengan adanya sektor usaha perdagangan dan perhotelan di Surakarta yang mencapai 27% dari total keseluruhan pendapatan yang ada di Kota Surakarta, maka secara otomatis akan memberikan Kontribusi yang besar terhadap KPP Pratama Surakarta khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang semakin meningkat. Karena adanya pemungutan pajak dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **D. Hambatan dan Upaya yang dilakukan KPP dalam mengantisipasi dan meningkatkan realisasi Penerimaan PPN**

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Ketua Seksi PDI, bahwa dalam melaksanakan rencana dan realisasi pajak di KPP Pratama Surakarta tahun 2015-2016 tidak luput dari hambatan-hambatan serta upaya untuk mengantisipasinya.

##### **1. Hambatan-hambatan yang timbul Realisasi Penerimaan PPN**

###### **a. SPT yang kurang lengkap**

Yakni SPT yang tidak diisi atau kurang pada lampirannya, atau tidak melampirkan ketentuan yang sudah ada di formalnya seperti :

- 1) Tidak tercantum Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat lengkap serta nama wajib pajak yang bersangkutan dalam SPT.



- 2) Tanda tangan dalam SPT kosong.
  - 3) Kuasa wajib pajak yang telah menandatangani SPT akan tetapi tidak melampirkan surat keterangan kematian dari instansi terkait atau surat kuasa yang khusus dari ahli waris oleh Wajib Pajak
  - 4) Tidak ada lampiran perhitungan kompensasi kerugian pada SPT.
- b. Surat Pemberitahuan Kembali, hal ini disebabkan karena :
- 1) Tidak diketahui alamat Wajib Pajak.
  - 2) Tidak melakukan kegiatan usaha tapi belum dibubarkan oleh Wajib Pajak badan.
  - 3) Tidak adanya pemberitahuan yang resmi dari ahli waris, jika WPOP telah meninggal dunia.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut bisa diketahui jika pada saat melaksanakan tugas terdapat beberapa hal yang memicu timbulnya masalah atau hambatan, apabila masalah tersebut muncul akan menjadi problematika yang akan menghambat berkembangnya ide serta kreatifitas. Sehingga penerimaan pajak indikatornya terlihat dari patuh atau tidaknya para Wajib Pajak serta berhasil atau tidaknya para aparat pajak terlihat saat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang perpajakan.

## **2. Upaya Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan PPN**

- a. Perlunya Penyuluhan tentang aturan-aturan pajak

Diharapkan dengan adanya penyuluhan tentang pajak, semua orang tidak perlu ragu dalam membayar pajak, dan juga sebaiknya semua aparat yang bekerja dibidang perpajakan harus memberikan

pelayanan sopan dan ramah, serta memberikan penjelasan tentang perpajakan secara detail kepada Wajib Pajak.

- b. Sistem yang berkenaan dengan administrasi perpajakan harus disempurnakan, khususnya PPN dengan melihat dari awal pemberian tentang kebijakan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)

Upaya tersebut dilakukan untuk menggenjot penerimaan pajak dengan tujuan agar tingkat kepastian hukum dan kepatuhan wajib pajak lebih ditingkatkan lagi, menciptakan suasana yang adil serta sehat dalam menjalankan usaha, dan merupakan upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan negara